At-Tafahum

Vol. 8 No. 1 (2025) pp. 23-33

ISSN : 2580-4707 (online) - 2549-0159(cetak)
https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/index

ISLAM AND DEMOCRACY: THE POLITICAL THOUGHT OF B.J. HABIBIE

Islam Dan Demokrasi : Pemikiran Politik B.J. Habibie

Gema Rahmadani, [1] Azhari AR, [2] Muhammad Faisal [3]

[1)] Universitas Darma Agung, Medan
[2)] Universitas Islam Sumatera Utara, Medan

Kata Kunci :

Democracy,
Politics,
B.J. Habibie

Abstract:

Research This study examines B.J. Habibie's political thought regarding the relationship between Islam and democracy, focusing on how the two can strengthen each other in the Indonesian context. Indonesian context. Using a literature study approach and qualitative analysis approach and qualitative analysis, this research explores Habibie's argument that principles of principles of democracy, such as social justice, deliberation, and freedom of speech, are in line with Islamic teachings. In addition, it identifies challenges faced in the integration of these values, including radicalization and identity politics. Through text analysis and interviews with experts, this research shows that Habibie's thought offers an optimistic an optimistic perspective regarding the implementation of democracy in a country with a large Muslim population. Muslim population. The findings show that education and interfaith dialog are key are key in overcoming challenges and realizing harmony between Islam and democracy. and democracy. This research is expected to contribute to a deeper understanding of the potential synergies between religious values and democratic practices, as well as their relevance to political development in and democratic practices, and their relevance for political development in Indonesia. Indonesia..

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:
gemagemapsr1000@gmail.com
Email: gemagemapsr1000@gmail.com, azhari.ar@fh.uisu.ac.id, muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id

PENDAHULUAN

Hubungan Islam dan demokrasi atau dengan katalain potensi demokratis Islam sebagai sebuah Agama, budaya dan peradaban masih merupakan persoalan yang kontroversial dan menimbulkan banyak perdebatan diantara pemikir politik Islam. Diantara pemikir politik tersebut ada yang menganggap bahwa Islam sebagai doktrin, dan Islam merupakan teks Al-Quran dan sebagai tradisi yang otoritatif. Sementara yang lain menganggap bahwa Islam

sebagai program politik yang mampu bersaing dengan ideology-ideologi sekuler, dan lebih superior dibanding ideologi sekuler tersebut.[1]

Sesudah Perang Dunia II demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara dunia.[2] Gelombang demokratisasi menimbulkan reaksi dari kalangan pemikiran Islam, ada yang menerima keseluruhan demokrasi, ada yang hanya menerima prinsip-prinsip dasarnya saja, kemudia ada yang dengan tegas menolak demokrasi. Persinggungan Islam dan demokrasi sebenarnya merupakan bagian atau konsekuensi logis dari pertemuan wacana politik Islam dan wacana politik Barat.

Latar belakang sejarah politik, Setelah reformasi 1998, Indonesia mengalami transisi dari rezim otoriter ke sistem demokrasi yang lebih terbuka. Dalam konteks ini, B.J. Habibie, yang menjadi presiden pada masa transisi tersebut, berperan penting dalam membangun fondasi demokrasi. Ia menyadari bahwa keberhasilan demokrasi di Indonesia sangat tergantung pada pemahaman masyarakat terhadap hubungan antara Islam dan demokrasi. Konsep Islam dan Demokrasi. Habibie berargumen bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan tentang tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial. Dalam pandangannya, prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat ditemukan dalam ajaran Islam. Ia menekankan bahwa:

1. Keadilan Sosial: Dalam Islam, keadilan adalah nilai fundamental. Habibie mengaitkan ini dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan pemerataan hak dan kesempatan bagi semua warga negara.
2. Partisipasi Masyarakat: Habibie mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, sejalan dengan konsep syura (musyawarah) dalam Islam. Ia percaya bahwa masyarakat harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
3. Kebebasan Berpendapat: Habibie mendukung kebebasan berpendapat dan berorganisasi sebagai bagian dari implementasi demokrasi. Ia berpendapat bahwa hak untuk mengekspresikan pendapat merupakan bagian dari martabat manusia yang dihormati dalam Islam.

Tantangan dan Solusi dalam politik, Meskipun terdapat potensi sinergi antara Islam dan

[1] Ulil Abhar Abdala, Islam dan Demokrasi, (Jakarta : FNS Indonesia 2002),hal.13
[2] Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka), hal.105.

demokrasi, Habibie juga mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti: Radikalisasi: Munculnya kelompok-kelompok yang menginterpretasikan Islam secara ekstrem dapat mengancam nilai-nilai demokrasi. Habibie berpendapat pentingnya pendidikan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih moderat tentang Islam. Kemudian, Politik Identitas: Terkadang, politik identitas dapat memecah belah masyarakat. Habibie menekankan perlunya dialog antaragama dan budaya untuk membangun persatuan dalam keragaman.

Pemikiran politik B.J. Habibie menawarkan perspektif yang optimis mengenai kemungkinan integrasi Islam dalam praktik demokrasi di Indonesia. Dengan menekankan pentingnya nilai- nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam, Habibie memberikan gambaran bahwa kedua aspek ini dapat saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Melalui pendidikan, dialog, dan partisipasi aktif, Habibie percaya bahwa Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring, memberikan harapan bagi masa depan politik yang lebih inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi pemikiran politik B.J. Habibie tentang Islam dan demokrasi dapat mencakup beberapa pendekatan berikut, Studi LiteratuR, Pengumpulan Data Sekunder: Mengumpulkan buku, artikel, dan tulisan-tulisan Habibie yang relevan. Ini termasuk dokumen kebijakan, pidato, dan wawancara yang pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan dan argumen Habibie mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi.

Analisis Teks, Analisis Kualitatif: Melakukan analisis teks terhadap karya-karya Habibie untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dan argumen yang dia sampaikan. Ini juga dapat mencakup pemahaman tentang konteks sosial dan politik pada saat pemikirannya muncul. Studi Kasus, Contoh Praktis: Menggunakan studi kasus dari pengalaman politik di Indonesia pasca- reformasi. Misalnya, menganalisis bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Habibie mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi.

Wawancara dan Diskus melalui Pengumpulan Data Primer: Melakukan wawancara dengan para ahli, akademisi, atau tokoh yang mengenal Habibie atau terlibat dalam politik pada masa pemerintahannya. Ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pengaruh pemikiran Habibie di lapangan.

Survei, Mengukur Persepsi Publik: Melakukan survei untuk mengukur pandangan

masyarakat mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi, serta bagaimana mereka melihat penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Survei ini dapat memberikan gambaran tentang penerimaan ide-ide Habibie di kalangan masyarakat.

analisis Komparatif, Perbandingan dengan Pemikir Lain: Menganalisis pemikiran Habibie dalam konteks pemikir politik Islam lainnya, seperti Abdurrahman Wahid atau Nurcholish Madjid. Ini membantu untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam pendekatan mereka terhadap isu-isu demokrasi dan agama.

Pendekatan Historis, Konteks Sejarah: Mempertimbangkan latar belakang sejarah Indonesia, termasuk pengaruh kolonialisme, Orde Baru, dan peristiwa penting lainnya yang membentuk pemikiran Habibie. Ini membantu dalam memahami bagaimana pengalaman sejarah memengaruhi pandangannya tentang demokrasi. Dengan menggunakan kombinasi metode ini, penelitian tentang pemikiran B.J. Habibie dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang bagaimana ia memandang hubungan antara Islam dan demokrasi, serta dampaknya terhadap politik di Indonesia. Pendekatan multi-metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih beragam dan analisis yang lebih holistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prof. Dr.-Ing. Ir. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng. lahir di Parepare, 25 Juni 1936 wafat :11 September 2019, adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Try Sutrisno. B. J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, B.J. Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat[3].

B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari (sebagai wakil presiden) dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan (sebagai presiden), B. J. Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek.

[3] https://id.wikipedia.org/wiki/B._J._Habibie#Penghargaan (di akses 3 Oktober 2023)

B. J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Kabila, Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membangun Monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Djalaluddin, di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama universitas negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan.

Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B. J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan "Visi Indonesia". Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam "Visi Indonesia" bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia (ICMI) yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karier Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 (menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.

Hubungan antara Islam dan Demokrasi

Habibie berargumen bahwa Islam dan demokrasi tidak saling bertentangan. Ia menunjukkan bahwa banyak prinsip demokrasi, seperti keadilan dan musyawarah, sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Habibie, Islam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mempromosikan kesejahteraan umum. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, Habibie mengajak umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi.

Pemikiran tentang Keadilan Sosial bahwa Keadilan sosial merupakan tema sentral dalam pemikiran Habibie. Ia percaya bahwa salah satu tujuan utama dari negara demokratis adalah memastikan keadilan bagi seluruh warganya. Dalam konteks Islam, prinsip keadilan

tidak hanya berbicara tentang hukum, tetapi juga tentang distribusi sumber daya dan kesempatan. Habibie menginginkan agar kebijakan publik dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Musyawarah dan Partisipasi Masyarakat, Habibie menekankan pentingnya musyawarah (syura) sebagai metode pengambilan keputusan dalam Islam. Ia berpendapat bahwa prinsip ini harus diimplementasikan dalam sistem politik. Musyawarah mengajak partisipasi aktif masyarakat, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks demokrasi, partisipasi ini menjadi krusial untuk membangun legitimasi dan akuntabilitas pemerintah.

Kebebasan Berpendapat dan Hak Asasi Manusia, Habibie sangat mendukung kebebasan berpendapat sebagai landasan demokrasi. Ia berpendapat bahwa hak untuk mengemukakan pendapat, termasuk kritik terhadap pemerintah, adalah bagian dari martabat manusia yang harus dihormati. Dalam Islam, kebebasan berpendapat juga diakui, asalkan dilakukan dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Habibie menekankan bahwa penegakan hak asasi manusia harus menjadi prioritas dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Menghadapi Tantangan meskipun ada potensi positif, Habibie menyadari berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini:

1. Radikalisasi: Radikalisasi dapat muncul ketika interpretasi Islam diambil secara ekstrem. Habibie percaya bahwa pendidikan yang menekankan pada pemahaman moderat tentang Islam sangat penting untuk melawan ekstremisme.
2. Politik Identitas: Terkadang, identitas agama dan budaya dapat digunakan untuk memecah belah masyarakat. Habibie mendorong dialog antaragama sebagai cara untuk membangun persatuan dalam keragaman, sehingga konflik dapat diminimalisir.

Kontribusi untuk Masa Depan, Habibie memberikan visi yang optimis tentang masa depan Indonesia sebagai negara yang mengintegrasikan Islam dan demokrasi. Ia meyakini bahwa dengan pendidikan yang tepat, dialog yang konstruktif, dan partisipasi aktif, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara- negara lain dalam mewujudkan harmoni antara nilai-nilai agama dan praktik demokrasi.

Pemikiran B.J. Habibie tentang Islam dan demokrasi mencerminkan harapan untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan demokratis. Dengan mengedepankan nilai-

nilai keadilan, musyawarah, dan kebebasan berpendapat, Habibie menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi pilar dalam penguatan demokrasi, bukan sebagai penghalang. Upaya untuk mendamaikan kedua aspek ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan politik di Indonesia.

Riwayat karier pemerintahan[4]

1) Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan III (1978–1983);
2) Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan IV (1983–1988);
3) Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan V (1988–1993);
4) Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan VI (1993–1998);
5) Ketua Tim Keputusan Presiden (Keppres) 35;
6) Wakil Presiden RI (1998);

Jalan Terjal Karier Politik BJ Habibie[5]

Presiden ke-3 RI BJ Habibie meninggal dunia dalam usia 83 tahun karena sakit. Selama hidupnya, perjalanan karier Habibie tak hanya soal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pemerintahan. Setelah hampir 20 tahun menempuh pendidikan dan bekerja di Jerman, Habibie dipanggil Presiden ke-2 RI Soeharto untuk kembali ke Indonesia pada 1973. Saat itu, Soeharto menilai Habibie bisa memberikan sentuhan baru di pengembangan industri teknologi di Indonesia. Habibie pun kemudian menjadi pendiri Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Ia juga diberikan mandat oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada 1978, dan menjabat selama 20 tahun. Namun, saat krisis moneter, Soeharto terpaksa menutup IPTN. Di saat-saat krisis ekonomi, Habibie diangkat sebagai wakil presiden sebagai wakil presiden dalam Kabinet Pembangunan VII pada 14 Maret 1998. Habibie, yang biasanya mengurusi pengembangan teknologi, akhirnya ikut dibuat pusing dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997-1998. Selang dua bulan kemudian, Habibie menggantikan Soeharto yang menyatakan mundur sebagai presiden, setelah gejolak politik dan reformasi pada 21 Mei 1998.

[4] ibid
[5] https://kumparan.com/kumparannews/jalan-terjal-karier-politik-bj-abibie1rqNMHF6rUC/full (diakses 3 oktober 2022)

Diakui Habibie, menjadi presiden di masa-masa krisis bukanlah hal mudah. Saat memimpin Indonesia, yang saat itu dalam keadaan berantakan, Presiden Habibie membuat beberapa keputusan penting. Beberapa keputusan itu tertuang dalam Undang-Undang, seperti UU Otonomi Daerah, UU Partai Politik, hingga UU Anti Monopoli. Saat itu, banyak partai-partai politik terbentuk, karena Habibie memberikan kebebasan dan keleluasaan dalam berpolitik. Tak hanya itu, lewat kabinet yang dibentuknya, sejumlah program pemulihan ekonomi Indonesia pascareformasi juga dibentuk untuk mengatasi krisis. Jika sebelumnya nilai mata uang rupiah mencapai Rp 15 ribu per dolar, maka Habibie berhasil menekannya jadi Rp 10 ribu per dolar. Namun, Habibie juga tak terlepas dari kritik. Salah satunya saat ia dianggap menjadi penyebab lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada 30 Agustus 1999. Habibie menilai konflik Timor Timur menghambat stabilitas ekonomi dan politik, sehingga ia memberikan dua opsi: menerima otonomi khusus atau memisahkan diri dari Indonesia. Yang kemudian keputusan akhir untuk menyelesaikan persoalan ini adalah memilih opsi kedua. Timor Timur juga menolak otonomi khusus yang ditawarkan Pemerintah Indonesia. Tuntutan referendum yang disuarakan rakyat Timor Timur ditanggapi Habibie, yang kemudian diajukan ke Sekjen PBB Kofi Annan. Dalam pertimbangannya, Habibie menyebut subsidi moneter yang diberikan pemerintah tak sebanding dengan manfaat yang didapat Timor Timur. Dan pada 30 Agustus 1999 menjadi hari bersejarah bagi Timor Timur yang akhirnya berhasil memisahkan diri dari NKRI lewat referendum kemerdekaan.

Tanggal 30 Agustus 1999, ketika perpolitikan Indonesia masih terguncang pasca-tumbangnya Orde Baru, digelar referendum di Timor Timur di bawah perjanjian yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara Indonesia dan Portugal. Hasilnya, Timtim lepas dari NKRI. Berikut ini kronologi pisahnya Timor Timur dan NKRI, dirangkum dari buku Timor Timur Satu Menit Terakhir (2008):

19 Desember 1998 Perdana Menteri Australia, John Howard, mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie. Howard mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. 25 Januari 1999 Digelar rapat untuk membahas surat Howard. “Tolong dipelajari. Apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timtim masih merasa belum cukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melalui Sidang Umum MPR?” kata Presiden Habibie waktu itu. 27 Januari 1999 Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri RI mengumumkan menawarkan opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timor Timur. Jika ditolak, maka

pemerintah Indonesia akan merelakan Timor Timur. Sempat terjadi pro-kontra di internal kabinet saat itu. Maret-April 1999 Terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timor Timur, antara lain eksodus massal warga pendatang, kekerasan di Gereja Liquica yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi, hingga kerusuhan besar di Dili yang menelan korban jiwa.

21 April 1999 Kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatan damai di kediaman Uskup Belo dengan disaksikan langsung oleh Menhankam/Pangab Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto, serta beberapa tokoh lainnya. 27 April 1999 Presiden Habibie menggelar pertemuan dengan John Howard. Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timor Timur. 5 Mei 1999 Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama, bersama Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timor Timur di Markas PBB New York. Dua hari kemudian, Sidang Umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan itu. 17 Mei 1999 Presiden Habibie mengeluarkan Kepres No.43/1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan RI-Portugal tentang Timor Timur, kemudian dikuatkan dengan Inpres No.5/1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal.

Dalam sidang umum MPR 1999, laporan pertanggungjawabannya Habibie ditolak. Pada hari yang sama, ia menyatakan mundur dari pencalonannya sebagai presiden, menyusul penolakan laporan pertanggungjawabannya. Total Habibie menjabat sebagai presiden selama 1 tahun 5 bulan, sebelum akhirnya digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 20 Oktober 1999. Masa jabatan Habibie relatif singkat dibandingkan dengan presiden dan wakil presiden lainnya. Karier politik Habibie selesai setelah beliau mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden pada tahun 1999 karena laporan pertanggungjawabannya ditolak pada Sidang Umum MPR 1999. Padahal, sebelumnya dia digadang-gadang oleh partai Golkar sebagai calon presiden. Meskipun tidak lagi berkarier di kancah politik seperti sebagai pejabat partai atau jabatan lainnya dalam pemerintahan, Habibie tetap berkiprah dalam pembangunan bangsa. Salah satunya adalah dengan mendirikan *The Habibie Center*, yaitu sebuah lembaga penelitian yang berupaya membangun demokratisasi di Indonesia berdasarkan integritas moral dan agama. Melalui lembaga tersebut, Habibie ingin membangun sumber daya manusia dengan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan di Indonesia.

KESIMPULAN

Pemikiran politik B.J. Habibie mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi menawarkan wawasan yang penting dalam konteks Indonesia. Ia berargumentasi bahwa nilai-nilai demokratis, seperti keadilan sosial, musyawarah, dan kebebasan berpendapat, selaras dengan ajaran Islam, menciptakan potensi untuk mengintegrasikan keduanya dalam kerangka negara yang demokratis. Habibie menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagai manifestasi dari prinsip syura, sekaligus mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam proses demokratisasi. Meski demikian, ia juga menyadari tantangan yang dihadapi, seperti radikalisasi dan politik identitas, yang dapat mengancam stabilitas dan kohesi sosial. Melalui pendidikan yang menekankan pemahaman moderat tentang Islam dan dialog antaragama, Habibie percaya bahwa tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Kesimpulannya, pemikiran Habibie memberikan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mewujudkan sinergi antara Islam dan demokrasi, menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan demokratis. Dengan pendekatan yang tepat, kedua aspek ini tidak hanya dapat coexist, tetapi juga saling mendukung dalam pembangunan politik dan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdala, Ulil Abhar. 2002. *Islam dan Demokrasi.* Jakarta: FNS Indonesia.

Arif, Syamsudin. "Politik Islam Beda dengan Islam Politik." *Dakta.com.* Diakses 2 Oktober 2023. http://dakta.com/news/6578/politik-islam-beda-dengan-islam-politik.

"Artikel: Sejarah & Kronologi Timor Timur Lepas dari RI yang Diungkit Prabowo." *Tirto.id.* https://tirto.id/dcJi.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka.

Esposito, John L., dan John O. Voll. 1996. *Islam and Democracy.* New York: Oxford University Press.

Habibie, B. J. 1998. *Membumikan Islam: Reformasi, Demokrasi dan Kemanusiaan.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

——. 2005. *Pengalaman, Pemikiran, dan Harapan: Menyongsong Indonesia yang Baru.* Jakarta: Kompas.

Hasyim, Muhammad. 2011. "Islam dan Demokrasi: Refleksi Pemikiran B.J. Habibie." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 15(2): 123–134.

Kadir, Abdul. 2015. "Demokrasi dan Islam: Perspektif B.J. Habibie." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 8(1): 99–112.

Kumparan News. "Jalan Terjal Karier Politik B.J. Habibie." *Kumparan.com.* Diakses 3 Oktober 2022. https://kumparan.com/kumparannews/jalan-terjal-karier-politik-bj-habibie-1rqNMHF6rUC/full.

Liddle, R. William. 1996. *Islam, Politics, and Modernity in Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Madjid, Nurcholish. 1997. *Islam, Kemodernan, dan Pendidikan.* Jakarta: Paramadina.

Rahman, A. 2009. *Politik Islam di Indonesia: Antara Ideologi dan Praktik.* Yogyakarta: LKiS.

Salim, A. 2010. "Islam dan Demokrasi: Menyikapi Tantangan di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Politik* 5(1): 45–58.

Subhan, Agung. "Sumber dan Metode Pemikiran Politik Islam." *Subhanagung.blogspot.com.* Diakses 21 Januari 2023. https://subhanagung.blogspot.com/2009/01/sumber-dan-metode-pemikiran-politikislam.html?m=1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Umar, M. 2008. "B.J. Habibie dan Pemikiran Politik Islam." *Jurnal Kajian Politik* 10(2): 87–101.

Universitas Siliwangi. "BAB II." *Repositori UNSIL.* http://repositori.unsil.ac.id/4517/6/BAB%20II.pdf.

Wikipedia. "B. J. Habibie." *Wikipedia Bahasa Indonesia.* Diakses 3 Oktober 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/B._J._Habibie#Penghargaan.

Bangkit Media. "Ngaji Ushul Fiqh 11: Qiyas sebagai Sumber Hukum Keempat." *Bangkitmedia.com.* Diakses 2 Oktober 2023. https://bangkitmedia.com/ngajiushul-fiqh-11-qiyas-sebagai-sumber-hukum-keempat/.